

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia khususnya di pedesaan baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian. Hal ini merupakan sebuah konsekwensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Hal ini dipertegas lagi oleh GBHN 1999 tentang pembangunan pedesaan yang intensitasnya ditingkatkan guna mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat. Pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam (GBHN:1999).

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Rahardjo, 2006:3).

Sebelum di bentuk berbagai institusi lokal atau lembaga kemasyarakatan oleh Pemerintah seperti LKMD, PKK, Klompencapir, Kelompok Tani dan lembaga kemasyarakatan lainnya, selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga ini masih bersifat sangat

tradisional dengan berbagai kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Padahal disisi lain pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk menjadi wadah pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan (Suyanto, 1996) *dalam* Imron (2002:1).

Berbagai bentuk kelembagaan ekonomi petani telah banyak ditumbuhkembangkan dipedesaan, namun eksistensi dan kinerjanya masih kurang mengembirakan, bahkan keberadaannya dalam menopang perekonomian dipedesaan cenderung tidak berkesinambungan. Hal ini karena kebanyakan kelembagaan yang ditumbuhkembangkan lebih bersifat “top down” dan bahkan lebih cenderung mengeneralisasikan suatu bentuk kelembagaan untuk dijalankan tanpa memperhatikan struktur sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya banyak kelembagaan baru yang masuk kepedesaan tidak memperoleh respon dan konsesnsus dari masyarakat, oleh karena itu introduksi kelembagaan baru kedalam masyarakat perlu menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan-kelembagaan lokal yang ada (Hermanto, 2007) *dalam* Harmen (2012:1).

Pada sistem lokal setiap daerah mempunyai kelembagaan lokal tersendiri dalam mengatur tatanan sosial kemasyarakatannya. Setiap daerah akan memiliki kelembagaan lokal yang berbeda, hal itu disesuaikan dengan budaya maupun ekologis pada daerah tersebut. Fungsi utama dari adanya kelembagaan lokal tersebut adalah untuk memfasilitasi seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menentukan segala sesuatu yang menjadi pedoman mereka dalam berinteraksi baik dengan manusia, alam dan tuhan. Adapun tujuannya adalah demi kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat itu sendiri (Sayuti 2005) *dalam* Sudino (2011:1).

Lembaga lokal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya lembaga lokal ditambah dengan birokrasi dan partisipan, infrastruktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan. Jasa pelayanan masyarakat tidak dapat dilakukan sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat memelihara atau mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian kelembagaan lokal merupakan faktor dominan, terutama dalam

menggerakkan partisipasi. Sesungguhnya aktivitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri (Esman dan Uphoff, 1998).

Peran lembaga lokal atau lembaga kemasyarakatan desa perlu ditingkatkan agar masyarakat desa dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Salah satu lembaga yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat di pedesaan untuk meningkatkan usaha sesuai dengan kebutuhan, serta sekaligus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka adalah lembaga ekonomi seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi ataupun Lembaga Simpan Pinjam lainnya (Cornelis dan Miar, 2003:66).

Di Sumatera Barat tepatnya di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdapat suatu lembaga lokal yang masih eksis sampai saat ini, bahkan fungsinya semakin kuat dalam membantu kegiatan perekonomian masyarakat sekitar. Lembaga lokal ini adalah bentuk lembaga yang bergerak dibidang keuangan yaitu simpan pinjam uang. Meskipun ada intervensi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya sama dengan lembaga tersebut (seperti : KUD, KSP, LKM dan lainnya) namun hal itu tidak membuat lembaga lokal tersebut hilang atau tergantikan ditengah-tengah masyarakat karena lembaga ini mempunyai jatidiri sendiri yang khas dalam mengelola kegiatan simpan pinjam lebih bersifat elastis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan berlakunya peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat 2/2007 tentang pemerintahan nagari sebagai sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah di daerah berdasarkan undang-undang 32/2004 tentang pemerintah daerah dimana dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik dan efisien di daerah, dimana partisipasi masyarakat dapat dikembangkan lebih luas, tidak terbatas sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat, tetapi secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program

pembangunan yang akan dilakukan. Untuk terealisasinya hal tersebut diperlukan peran aktif dalam berbagai kelembagaan yang ada dalam nagari, terutama yang dapat menampung aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah nagari. Salah satu contohnya yaitu Lembaga Keuangan Simpan Pinjam, Koperasi Unit Desa (KUD) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Dari data Dinas Koperindag dan UMKM Kabupaten Solok tahun 2012 tentang banyaknya Koperasi dan Koperasi Unit Desa Per kecamatan di Kabupaten Solok (lampiran 1), terlihat bahwa jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kecamatan Lembah Gumanti hanya terdapat 3 unit KUD sedangkan pada data tahun 2013 hanya tersisa 2 unit KUD. Setelah dilakukan survei ternyata KUD tersebut tidak aktif lagi saat ini. Sedangkan untuk koperasi Non KUD dibagian koperasi simpan pinjam pada tahun 2012 koperasi ini sebanyak 2 unit dan jumlahnya meningkat pada tahun 2013 sebanyak 13 unit koperasi. Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam tersebut tidak hanya terjadi di Kecamatan Lembah Gumanti saja, tapi juga di kecamatan lain terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Meskipun di Kecamatan Lembah Gumanti terjadi peningkatan jumlah Koperasi Simpan pinjam, tapi setelah disurvei di Kenagarian Sungai Nanam tidak terdapat KSP (Koperasi Simpan Pinjam) yang ada hanyalah lembaga lokal yang memang bergerak dibidang simpan pinjam uang.

Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok terdapat suatu lembaga lokal yang telah ikut menopang perekonomian masyarakatnya. Lembaga tersebut diberi nama Handel, lembaga handel adalah sebuah lembaga yang kegiatannya bergerak dibidang keuangan yaitu simpan pinjam, kata handel sendiri berasal dari bahasa daerah yang berarti perputaran. Maksud dari perputaran itu adalah semua anggota melakukan simpanan wajib perminggu atau perbulan dengan iuran sesuai pada kesepakatan awal. Bagi anggota yang membutuhkan dana atau modal untuk kegiatan usahanya, anggota tersebut bisa melakukan peminjaman sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 (*dalam* Sitio dan Tamba 2001:26) tentang “prinsip-prinsip koperasi” yaitu keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis dengan selalu mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), pembagian SHU dibagikan secara adil sesuai dengan jasa yang diberikan anggota, pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi pendidikan. Dari prinsip koperasi ini beberapa diantaranya dimiliki oleh lembaga handel, prinsip yang tidak ada yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi serta tidak mempunyai dokumen tertulis seperti Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan hal lain yang bersangkutan dengan formalitas. Prinsip utama yang dipegang oleh lembaga handel adalah prinsip kekeluargaan dengan melakukan usaha yang mengutamakan kepentingan anggota serta mempunyai toleransi yang tinggi terhadap anggota yang bersifat elastis dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta meminimalkan kegiatan formalitas.

Awal mula terbentuknya lembaga handel jauh sebelum adanya lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah bahkan sebelum Indonesia merdeka lembaga ini sudah ada (berdasarkan survei pendahuluan). Awal pembentukan lembaga handel ini dimaksudkan untuk menyimpan hasil panen dari para anggota yaitu padi. Padi tersebut disimpan oleh anggota yang melakukan pemanenan pada saat itu, kemudian bagi anggota yang membutuhkan bisa meminjamnya dan penggantian pinjaman dilakukan pada saat anggota yang meminjam tadi memanen padinya. Seiring perkembangan zaman lembaga tersebut yang semula melakukan kegiatan simpan pinjam padi beralih ke simpan pinjam uang yang mana kegiatan itu dimaksudkan untuk membantu para anggota yang terkendala modal dalam melakukan usahatani. Selain bergerak dibidang simpan pinjam (yang dapat membantu menggerakkan usahatani dari para anggota), sumbangan lembaga handel juga diperuntukkan untuk membangun sarana ibadah, jalan dan kegiatan sosial lainnya.

Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie merupakan salah satu lembaga handel yang berada di Sampie yaitu di Jorong Koto Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Lembaga Lokal Handel Surau Nurul

Ikhwan Sampie ini mulai berdiri pada tahun 2006. Awalnya Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie hanya memiliki anggota sebanyak 24 orang, hingga tahun 2016 jumlah anggota lembaga ini meningkat menjadi 147 orang dapat dilihat pada lampiran 2.

Sejak berdiri pada tahun 2006, Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie belum pernah melakukan penilaian kinerja khususnya kinerja keuangan, namun hanya membuat catatan keuangan simpanan anggota serta catatan keuangan pinjaman anggota tiap periodenya serta mencatat pengeluaran dan pemasukan uang kas tiap minggunya. Perkembangan Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie bisa dikatakan baik dari tahun ketahun, ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang cenderung meningkat tiap periodenya (Lampiran 2) dan Kas akhir periode juga cenderung meningkat tiap periodenya (Lampiran 3). Peningkatan ini tentu belum bisa memberikan penilaian secara keseluruhan baik buruknya kinerja keuangan Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie .

Mengetahui kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie ini sangat penting khususnya kinerja keuangan, karena walaupun lembaga tersebut mengalami peningkatan kas akhir tiap tahunnya itu bukannya ukuran mutlak bahwa koperasi telah bekerja secara efektif dan efisien. Selama ini Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie ataupun lembaga simpan pinjam lainnya seperti koperasi untuk sistem perhitungan keuangan pada umumnya hanya membandingkan jumlah laba atau rugi yang diperoleh dan membandingkan jumlah aktiva yang dimiliki terutama kas untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan. Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie beranggapan bahwa kinerja keuangan yang baik hanya dapat dilihat dari saldo kas, aktiva tetap, dan laba. Sehingga lembaga tersebut belum mengetahui sejauh mana kondisi kinerja lembaga secara keseluruhan.

Wardhani (2013) dalam Deniyanto (2015:3), “Koperasi dianggap sehat apabila mampu mengelola keuangan atau sumber daya yang ada, pengelolaan keuangan yang baik akan mampu meningkatkan pendapatan anggotanya”. Oleh karena itu kesehatan koperasi menjadi hal penting dalam menjalankan usahanya, dengan demikian bahwa koperasi akan berhubungan dengan berbagai pihak baik

pengurus, anggota dan pihak luar yang turut serta dalam memantau kondisi keuangannya. Dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya. Dalam penilaian tingkat kesehatan kinerja koperasi dapat dilakukan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan (KSP) Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi menjadi alat analisis untuk mengukur kinerja koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Hasil evaluasi kinerja koperasi akan menunjukkan predikat koperasi dilihat dari tingkat kesehatan koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Meskipun lembaga handel bukan lembaga yang sepenuhnya berbentuk koperasi tetapi untuk menilai suatu kinerja lembaga keuangan bisa di gunakan dan disesuaikan dengan tolak ukur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penilaian acuan patokan (PAP).

Penelitian tentang analisa kinerja keuangan lembaga lokal handel ini sangat penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lembaga ditinjau dari kinerja keuangan dan manajemennya yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan maupun anggota dalam membuat keputusan dalam pengembangan lembaga. Supaya Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, menurut peneliti perlu dilakukan penilaian kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie ini.

Berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Profil dan Sistem Pengelolaan Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie di Jorong Koto Sungai Nanam?

2. Bagaimana Kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie di Jorong Koto Sungai Nanam?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie Di Jorong Koto Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan Profil dan Sistem Pengelolaan Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie di Jorong Koto Nagari Sungai Nanam.
2. Menganalisis Kinerja Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie di Jorong Koto Nagari Sungai Nanam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga Lokal Handel Surau Nurul Ikhwan Sampie Jorong Koto Nagari Sungai Nanam, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi internal dan eksternal organisasi serta dapat menjadi acuan untuk melakukan kegiatan organisasi dengan lebih baik.
2. Bagi penulis dan pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dan informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi program yang telah ada maupun dalam memberikan program baru terhadap masyarakat serta bisa mempertimbangkan dan memperkuat keberadaan lembaga-lembaga lokal yang ada disuatu daerah.